
ARTICLE

Sport Policy Interfaces di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan

Arizka Warganegara^{1*}

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Warganegara, A., (2023) Sport Policy Interfaces di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan. *Administrativa*. (5) 1

Article History

Received: 10 April 2023

Accepted: 11 April 2023

Keywords:

Policy, Sports Policy, Professional, Political Intervention and Indonesia

ABSTRACT

Discussing sport policy in Indonesia is complex and interesting, but there are not many Indonesian policy scholars who focus their research on this particular area of study. There are some reasons why this occurs in Indonesia. First, sport is considered a second-class profession in Indonesia, and policies that focus on sport are presumably not considered very important. However, in some major sport countries, such as the United Kingdom and Germany, sport policy is an integral aspect of sport science and industry. In those major countries, sport policy, vis-à-vis sport science and industry, has been massively developed in the last few decades. This paper aims to introduce sport policy and reveal its development in the context of Indonesia. This paper provides a brief snapshot of some aspects of sport policy that need to be reformed for a better and more professional sporting environment in Indonesia

ABSTRAK

Membicarakan *sport policy* atau kebijakan olah raga di Indonesia menjadi sangat unik dan menarik, mengapa? belum banyak scholar atau ilmuwan kebijakan di Indonesia yang memokuskan kajiannya pada kebijakan olah raga. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa ketidakpopuleran terhadap kajian kebijakan olah raga tersebut terjadi, antara lain olahragawan masih dianggap sebagai profesi kelas dua serta kajian soal olah raga dan kebijakan yang melingkupinya masih dianggap tidak penting padahal di negara-negara eropa seperti Inggris dan Jerman, kebijakan olah raga adalah bagian *integral* dari *sport science* (keilmuan olah raga) dan sangat berkembang dengan pesat seiring proses industrialisasi olah raga yang berkembang secara massif beberapa decade terakhir. Paper ini mencoba memberikan pengenalan terhadap kebijakan olah raga dan bagaimana perkembangan kebijakan olah raga dalam konteks Indonesia. Paper ini memberikan *snapshot* awal terhadap beberapa hal yang mesti dilakukan bagi membenahi kebijakan olah raga di Indonesia agar dapat lebih profesional di masa yang akan datang.

Kata Kunci:

Kebijakan, Kebijakan Olah Raga, Profesional, Intervensi Politik dan Indonesia

* Corresponding Author

Email : arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sport policy atau kebijakan olah raga adalah sebuah kajian yang sangat penting bagi pengembangan dan perkembangan olah raga di sebuah negara. Kebijakan olah raga yang terukur dan berkelanjutan akan menghasilkan para atlet lebih kompetitif dan berprestasi. Dalam konteks yang lebih makro, kebijakan publik umumnya terbagi dalam 3 (tiga) aspek penting yaitu *input-proses-output*, menjadi hal yang juga penting mendiskusikan bagaimana olah raga berproses dalam dimensi kebijakan publik. Kebijakan olah raga adalah sebuah paradigma yang tidak terlepas dari kebijakan publik sebuah negara. Kenapa? kebijakan publik yang diambil oleh lembaga otoritatif juga didalamnya mencakup kebijakan olah raga sebuah negara.

Ada beberapa aspek dalam kebijakan olah raga yang menjadi perhatian para ilmuwan *sport science*. Aspek tersebut adalah apakah kebijakan olah raga tersebut berdampak *private* atau *public* karena kedua hal ini akan menghasilkan dampak yang berbeda termasuk dari sisi pendanaan.

Definisi kebijakan olah raga tidak dapat dipisahkan dari pengertian kebijakan secara umum. Proses kebijakan yang terfokus pada olah raga adalah definisi umum dari kebijakan olah raga. Secara teoritik ada beberapa tahap dalam memulai kebijakan yaitu: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan olah raga tidak dapat dipisahkan dari *practice of governance* dan *political influence of local government* jika kemudian kebijakan olah raga dikaitkan pada aspek mikro level *governance* yaitu pemerintahan lokal.

Pada bagian lain, negara-negara *global north* (global utara) sudah berhasil menjadikan olah raga sebagai bagian dari “pekerjaan” profesional dan ini kemudian mendukung program secara utuh kebijakan pengembangan olah raga di negara-negara tersebut. Contoh paling aktual adalah pengelolaan *English Premier League* (EPL) yang mendunia tersebut. Kontan.co.id (2020) melaporkan bahwa Liverpool menerima hadiah sampai dengan 2,59 triliun saat memenangi EPL pada musim 2019/2020. Sebuah angka yang fantastis untuk olah raga profesional sepak bola. Angka 2,59 triliun dalam konteks Indonesia sudah cukup membangun 185 lapangan sepak bola modern ala EPL, jika dirata-rata membangun stadion berkapasitas 50 ribu penonton memakan biaya 300-700 juta Pound Sterling (lagaliga.id, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan hasil analisis data sekunder dan tinjauan pustaka. Tinjauan literatur merupakan penelitian tersendiri karena memungkinkan peneliti untuk menentukan hubungan antara masalah, studi terkait, dan teori kontekstual. Tinjauan literatur berkontribusi dalam memberikan gambaran umum tentang masalah yang diteliti dan dukungan konseptual dan teoritis (Fraenkel et al., 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Indonesia dan Pembenahan

King (2009: 33) menjelaskan, terdapat beberapa pendekatan untuk menjelaskan kebijakan (olah raga) yaitu dengan menggunakan *policy network* ini penting bagi memahami bagaimana kebijakan dikaitkan dengan *resources dependency* dan membedakannya dengan yang lain. Dalam konteks argumen teoritik konteks Swedia misalkan, Fahlén and Stenling

(2016: 523) menjelaskan “*Current sport policy priorities and debates are affected by public policy priorities and funding trends in general*”. Perdebatan mengenai kebijakan olah raga kekinian fokus pada prioritas kebijakan publik dan bagaimana tren pendanaan secara umum. Sudah lazim olah raga tidak akan bisa bergulir dan berdampak secara profesional jika tidak ditopang oleh pendanaan. Hal besar soal pendanaan ini yang kemudian menjadi isu terutama pada negara-negara *global south* (global selatan).

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merubah semua lanskap kebijakan di Indonesia yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi (Bettinger, 2015, Seymour and Turner, 2002). Dampak desentralisasi juga menysasar pada kebijakan olah raga di Indonesia. Dalam konteks *governance* olah raga misalkan, pengelolaan dan pengembangan olah raga daerah menjadi arena kewenangan pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi walaupun dalam konteks tertentu pemerintah pusat masih memiliki peran yang cukup signifikan melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemepora).

Akan tetapi, *Governance* Kemepora yang lebih pada kementerian di level nasional dan tidak memiliki kewenangan langsung (*direct authority*) terhadap pemerintah daerah juga menyebabkan banyak koordinasi dan pengembangan olah raga belum berjalan maksimal apalagi jika kita bicara garis debarkasi antara kebijakan olah raga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Garis debarkasi yang tidak jelas ini yang kemudian berdampak pada tidak efektifnya kebijakan olah raga di Indonesia. Sebagai ilustrasi ketidadaan *direct authority* tersebut yang kemudian menyebabkan efektivitas dan efisiensi kebijakan sering sekali terinterupsi oleh logika formalitas kebijakan pemerintah daerah apalagi jika kemudian secara anggaran olah raga dianggap bukan sebagai bagian dari prioritas sebuah daerah.

Walaupun demikian sebuah studi yang dilakukan oleh Ma'mun (2019: 17) menjelaskan bahwa “*In a broad sense, sports policy is a developmental sector that is integral to the development of national policy itself. Democratic national leadership is the result of a political system that has become a major force in developing Indonesian sports policy*”. Dampak desentralisasi politik Indonesia menyebabkan pengembangan olah raga di Indonesia sangat dipengaruhi dengan kepemimpinan nasional yang dihasilkan oleh sistem politik dan hal tersebut menjadi faktor penting dalam pengembangan kebijakan olah raga di Indonesia. Jika kepemimpinan nasional hasil dinamika politik menganggap bahwa olah raga adalah bagian yang penting maka secara tidak langsung pengembangan olah raga akan relatif lebih baik. Faktor subjektivitas kepemimpinan nasional ini yang kemudian juga berdampak pada tidak kebijakan olah raga yang kerap dihasilkan tidak berdampak maksimal.

Intervensi politik dalam kebijakan olah raga dapat dikatakan perlu dan tidak perlu walaupun secara ideal, intervensi politik *via* negara dalam konteks tertentu diperlukan sebagai bagian olah raga adalah bagian dari nasionalisme seperti apa yang ditunjukan pemerintah melalui ajang Asian Games berapa waktu lalu. Dalam konteks yang lain, terdapat beberapa hal yang menjadi *concern* bersama para *scholar* yang fokus pada pengembangan olah raga di Indonesia. Secara umum, kebijakan olah raga di Indonesia masih terlihat intervensi kuat dinamika politik belum ada pola kerjasama profesional antara pemerintah dan *sponsor*, masih terlihat *sponsor* masih cenderung secara umum mengedepankan keuntungan bisnis politik ketimbang murni “berikhtiar” bagi pengembangan olah raga di Indonesia dan ini sebenarnya juga masih merupakan masalah utama di berbagai negara *global south* (global selatan), mendorong *sponsor* bekerja secara profesional bagi pengembangan olah raga. Akan tetapi hal tersebut nampaknya masih jauh dari harapan, skema demokrasi patronase membuat kebijakan olah raga Indonesia kerap kali terintervensi oleh kuasa dan dinamika politik.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Pada akhirnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan bagi pengembangan kebijakan olah raga yang lebih profesional dan minus intervensi politik di Indonesia. Ma'mun (2019: 17) misalkan mengusulkan agar provinsi menggunakan otonomi yang dimiliki bagi membangun lebih banyak sekolah olah raga melalui dana pemerintah, *sponsorship* dan yayasan *private* dan Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat merubah paradigma kebijakan olah raga. Kompleksitas permasalahan, patronase politik dan minimnya dukungan serta *sponsorship* olah raga yang masih berorientasi pada keuntungan bisnis politik menyebabkan kebijakan olah raga di Indonesia masih jauh dari logika profesional dan maju. Perubahan paradigma cara pandang kebijakan olah raga dan *mind set* para pengambil kebijakan olah raga menjadi hal utama yang mesti dirubah bagi pengembangan kebijakan olah raga yang lebih baik pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Bettinger, K. A. 2015. Political contestation, resource control and conservation in an era of decentralisation at Indonesia's Kerinci Seblat National Park. *Asia Pacific Viewpoint*, 56, 252-266.
- Fahlén, J. & Stenling, C. 2016. Sport policy in Sweden. *International journal of sport policy and politics*, 8, 515-531.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw Hill.
- King, N. 2009. *Sport policy and governance*, Routledge.
- Kontan.CO.ID. 2020. *Wow! Hadiah Liverpool sebagai Liga Primer Inggris 2019/2020 hingga Rp 2,59 triliun* [Online]. Jakarta: Kontan Available: <https://lifestyle.kontan.co.id/news/waw-hadiah-liverpool-sebagai-liga-primer-inggris-20192020-hingga-rp-259-triliun?page=all> [Accessed 28 Februari 2021 2021].
- Lagaliga.ID. 2018. <https://ligaliga.id/cerita/stadion/untung-rugi-membangun-stadion-sendiri/> [Online]. lagaliga.id. Available: <https://ligaliga.id/cerita/stadion/untung-rugi-membangun-stadion-sendiri/> [Accessed 28 Februari 2021 2021].
- Ma'mun, A. 2019. Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present. *The International Journal of the History of Sport*, 36, 388-406.
- Seymour, R. & Turner, S. 2002. Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 33-51.